

## Muhammadiyah Harus Antisipasi Maraknya Penganut "Syekh Google"

Jum'at, 26-08-2016

SUKOHARJO- Persyarikatan Muhammadiyah dituntut untuk bisa memberikan solusi atas fenomena bermunculannya para penganut "Syekh Google" yang cenderung mencari kebenaran agama hanya lewat informasi internet.

Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sofyan Anif menjelaskan, fenomena yang disebut dengan *cyber religion* tersebut muncul beriringan dengan kemudahan setiap orang untuk mengakses situs-situs informasi lewat ponsel pintar.

"Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Muhammadiyah, bersinergi dengan Majelis Tabligh maupun Tarjih harus membangun sebuah sistem untuk mengantisipasi adanya *cyber religion* dan para penganut Syekh Google tersebut," jelas Sofyan saat pembukaan workshop pengelolaan website, database dan jurnalistik media yang diselenggarakan di Aula Fakultas Kedokteran UMS, Jumat (26/8).

Menurutnya, konten-konten ajaran Muhammadiyah yang tersebar di situs-situs pencarian dunia maya cukup minim. Karena itu, lanjut dia, MPI punya tugas untuk membangun sistem informasi yang disinergikan dengan Majelis Tabligh dan Tarjih untuk memperluas jangkauan ajaran Muhammadiyah.

Sofyan menyebutkan bahwa pernah ada kejadian, pelatihan tentang tata cara shalat khusyuk yang diselenggarakan oleh kader Muhammadiyah, sang narasumber justru mendapatkan ilmunya dari situs ajaran Syiah yang dicari lewat google. Itu menandakan Himpunan Putusan Tarjih (HPT) PP Muhammadiyah belum terpublikasikan dengan baik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPI PP Muhammadiyah, Muchlas mengemukakan, sistem berbasis teknologi informasi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

"Muhammadiyah adalah organisasi yang besar dan terus berkembang. Karena itu harus dikelola secara modern. MPI sudah mulai merumuskan sistem tersebut sejak sepuluh tahun lalu," ujarnya.

Menurut Muchlas, dalam kaitannya dengan itu, ada tiga kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Yaitu konten untuk mengaktifkan lebih dari 500 subdomain website dari tingkatan pusat, wilayah, daerah hingga berbagai majelis dan lembaga, database yang akurat, dan jurnalisme warga untuk

menyosialisasikan berbagai kegiatan persyarikatan. (MF/MPI Kab Tegal)